

**IMPLEMENTASI PROGRAM WILAYAH BEBAS KORUPSI
DI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
YOGYAKARTA**

Hana Pratiwi Setyaningrum¹, Daris Yulianto²

¹Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) "AAN" Yogyakarta

Email: darisaan79@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the Corruption Free Area (WBK) program at the Yogyakarta Food and Drug Monitoring Center (BBPOM). This research is a descriptive research using a qualitative approach. Sources of data obtained from interviews, observation, and documentation. The technique of determining the informants in this study was to use a purposive sampling method. Data analysis techniques use the theory of Miles and Huberman, consisting of: collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the WBK program includes indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure indicating that the program is running well, but not optimal. This can be seen from the existence of personal interests, limited budget for facilities and infrastructure, unfulfilled workload analysis (ABK) and uneven competence/quality of employees. Researchers recommend that this WBK program should be continued. The implications of implementing the WBK program are implemented in government institutions with employee development.

Keywords: *implementation; corruption free area.*

Pendahuluan

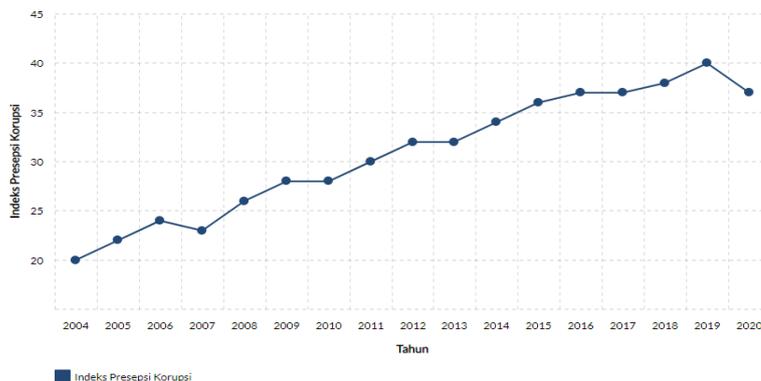
Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal dalam penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Reformasi birokrasi diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik tanpa memberikan permasalahan yang baru. Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien bertujuan untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi sebagai salah satu upaya nyata yang dilakukan untuk mengakselerasi penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, serta penguatan orientasi ke arah perbaikan pelayanan publik. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik melalui Zona Integritas dalam upaya pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Peraturann Presiden tersebut kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. Permen PAN RB ini telah diterapkan di instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Predikat WBK difokuskan pada terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan tujuan untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Transparency Internasional mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 yakni 37. Indeks tersebut menjadikan Indonesia di peringkat ke-102. Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya yakni di peringkat 86 dengan indeks 40. Posisi Indonesia sebelumnya berhasil direbut oleh Timor Leste yang berada di peringkat 86 dengan indeks 40. Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-5. (<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280#>, diakses pada tanggal 21 November 2022).

Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020



Sumber: *Transparency International, 2020*

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta merupakan salah satu unit kerja Badan POM yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. BBPOM di Yogyakarta telah mengimplementasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terhadap 6 area perubahan yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem, manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan pengawasan serta inovasi-inovasi. Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan predikat WBBM salah satunya adalah dengan memperbaiki dan menyelesaikan temuan WBK pada BBPOM.

Hasil FGD, Ketua Reformasi Birokrasi BBPOM di Yogyakarta, Ibu Dewi Prawitasari menyatakan bahwa pelaksanaan WBK masih terdapat beberapa kendala yang terjadi yaitu pelaksanaan WBK dalam area perubahan manajemen SDM. *Training need analysis* untuk pengembangan kompetensi yang belum optimal sehingga menyebabkan pegawai kurang memahami dalam menentukan pelatihan apa yang sesuai dengan masalah organisasi dan kinerja pegawai itu sendiri. Penguatan akuntabilitas kinerja belum memadai dikarenakan dalam pemanfaatan informasi belum diperbaiki secara optimal dari data dan informasi kinerja. Pelaksanaan WBK belum ada mekanisme *reward* dan *punishment* hanya kode etik petugas layanan sehingga banyak pegawai yang masih mengabaikan.

Peneliti tertarik untuk lebih mengetahui secara mendalam pelaksanaan program WBK yang ada di Balai Besar POM Yogyakarta dalam kerangka meraih predikat WBBM. Selain itu, BBPOM Yogyakarta merupakan salah satu unit kerja Badan POM yang meraih predikat WBK

dari dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dan menjadi percontohan bagi unit kerja yang akan meraih WBK.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti, Moleong dikutip Herdiansyah (2010: 9). Penelitian ini dipilih karena data yang dibuat secara faktual, akurat mengenai fakta-fakta yang berada di lapangan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, Sugiyono (2010: 15). Desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali pertanyaan mengenai implementasi program WBK BBPOM Yogyakarta sehingga metode penelitian yang diambil dirasa tepat dalam penelitian. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh hasil yang relevan, aktual dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Teknik tersebut meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data digunakan sebagai kejelasan bagaimana penelitian dilaksanakan darimana data diperoleh dan bagaimana proses pengambilan data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, Arikunto (2013: 172).

Teknik menentukan informan yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti, Sugiyono (2013: 368). Informan yang diambil oleh peneliti dilakukan disesuaikan dengan informan yang benar-benar mengetahui implementasi program WBK BBPOM Yogyakarta. Informan yang dipilih dalam penelitian ini terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Informan Penelitian WBK BBPOM

No.	Informan	Jumlah
1.	Sekretaris Reformasi Birokrasi BBPOM di Yogyakarta	1
2.	Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Sumber Daya Manusia	2
3.	Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Pengawasan	1
4.	Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Tata Laksana	1
5.	Petugas Layanan Publik	1
6.	<i>Agent Of Change</i> (AOC)	1
7.	Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pelayanan Publik	1
Total Informan		8

Sumber: Diolah peneliti

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara deskriptif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya lengkap dan akurat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif oleh Miles dan Huberman. Proses pelaksanaan analisis data dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah: reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Reduksi adalah Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, Sugiyono (2007: 247).

Hasil dan Pembahasan

Menurut Permen PAN & RB No. 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang mampu mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tujuan dari WBK adalah meningkatkan nilai IPK dan upaya pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu dan komprehensif, sasaran dari WBK adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Predikat WBK dapat diberikan kepada suatu unit kerja jika memenuhi sebagian besar program, meliputi : pertama, Manajemen perubahan, bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Kedua, Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI. Ketiga, Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada ZI. Keempat, Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Kelima, Penguatan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut Permen PAN & RB Tahun 2019 terdapat 2 jenis komponen untuk menuju WBK yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit (bobot 60%) dan komponen hasil (bobot 40%). Keberhasilan pembangunan ZI diukur dengan menilai pelaksanaan dari parameter komponen pengungkit dan komponen hasil. Rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja berpredikat menuju WBK:

Tabel 2. Komponen Pengungkit

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Total Bobot		60%

Sumber: Permen PAN & RB No. 10 Tahun 2019

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Komponen pengungkit terdiri dari 6 komponen yang harus dibangun, terdapat bobot 60% dari komponen pengungkit yang diperoleh dari masing-masing komponen pengungkit. Setiap komponen memiliki bobot target yang harus dicapai untuk mengukur keberhasilan suatu unit kerja. Komponen hasil rincian bobot indikator hasil unit kerja berpredikat menuju WBK:

Tabel 3. Komponen Hasil

No	Unsur Indikator Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran: i. Nilai persepsi korupsi (survey eksternal) dan ii. Presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP)	20%
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (Survei Eksternal)	20%
Total Bobot		40%

Sumber: Permen PAN & RB No. 10 Tahun 2019

Dapat dilihat dari tabel di atas komponen hasil merupakan sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang terdiri dari 2 komponen. Tercapainya komponen hasil ini tergantung pada keberhasilan dari komponen pengungkit. Dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh setiap unit kerja dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dapat diartikan sebagai komponen hasil.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta merupakan salah satu unit kerja Badan POM yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2019, BBPOM Yogyakarta berhasil meraih penghargaan berpredikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) (<https://www.krjogja.com/peristiwa/%20nasional/bbpom-yogya-raih-predikat-wilayah-bebas-korupsi-2019/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 pukul 08.00 WIB). BBPOM Yogyakarta telah mengimplementasi pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM terhadap 6 (enam) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan pengawasan serta inovasi-inovasi. Setelah mendapatkan predikat WBK pada tahun 2019, Balai Besar POM Yogyakarta berencana meningkatkan *performance*-nya untuk mendapatkan penghargaan sebagai WBBM yang merupakan kelanjutan reformasi birokrasi. Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan predikat WBBM salah satunya adalah dengan memperbaiki dan menyelesaikan temuan WBK pada BBPOM Yogyakarta. Berikut disampaikan indikator tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan.

Tabel 4. Indikator Kegiatan Terkait Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2019 BBPOM Yogyakarta

Kegiatan	Jumlah direkomendasikan diterbitkan Balai	Jumlah tindak lanjut/ <i>feedback</i>	Rasio
Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BBPOM	150	109	72,67
Tindak lanjut oleh instansi terhadap rekomendasi hasil pengawasan BBPOM	197	137	69,54
Total	347	246	70,89

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa rincian kegiatan BBPOM Yogyakarta tahun 2019 yang memperlihatkan keberhasilan rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan. Persentase tindak lanjut oleh instansi lebih rendah (69,54) jika dibandingkan tindak lanjut oleh pelaku usaha (72,67), artinya masih diperlukan upaya peningkatan dalam rencana kerja yang belum optimal sehingga perlu adanya monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan WBK dalam mekanisme monitoring dan evaluasi rencana kerja belum optimal dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik dalam menyampaikan sosialisasi terhadap jalannya monitoring dan evaluasi yang ada. Kurangnya interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung pada masing-masing pegawai, hal tersebut berhubungan dengan area perubahan dalam program WBK yaitu dalam hal manajemen SDM.

Penelitian implementasi program WBK di BBPOM Yogyakarta ini menggunakan teori George C. Edward III dengan alasan uraian variabel implementasi yang dijelaskan mudah dipahami dan tepat untuk mengukur sebuah pelaksanaan suatu program. Edward III dalam Juliartha (2009:58) menjelaskan empat variabel yang merupakan keberhasilan implementasi, meliputi : Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan; Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif; Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis; Struktur birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard*

Operating Procedures) atau SOP. Komunikasi dalam penelitian ini terdiri dari sub indikator transisi, kejelasan, dan konsistensi.

Transmisi, Komunikasi yang dilakukan dengan komunikasi langsung yaitu penyampaian informasi terkait pelaksanaan program melalui sosialisasi, pelayanan dan *customer gathering*. Seperti tampak pada gambar berikut :

Gambar 2. Kegiatan Customer Gathering



Sumber: BBPOM di Yogyakarta, 2022

Penyampaian komunikasi melalui sosialisasi, pelayanan dan customer gathering merupakan suatu kegiatan untuk dapat memberikan informasi terkait program WBK kepada pegawai, masyarakat, pelaku usaha dan pihak-pihak terkait, adapun penyampaian dari program WBK bekerjasama dengan lintas sektor untuk mendukung dan mendorong masyarakat mengetahui tentang pentingnya program WBK. Namun dalam penyaluran komunikasi tersebut masih ada sasaran program yang tidak datang dikarenakan kesibukan dari masing-masing pihak yang diundang. Berdasarkan dari penyaluran komunikasi tersebut, program WBK juga mendapat dukungan dari lintas sektor untuk menjalin kerjasama. Hal tersebut bertujuan agar saling mengetahui pentingnya program WBK. Bentuk kerjasama itu membuktikan adanya dukungan dari berbagai instansi untuk pelaksanaan program WBK.

Kejelasan, Informasi terkait program WBK di nilai baik terutama kejelasan dalam pemberitahuan program, baik melalui *customer gathering* maupun sosialisasi. Petugas memberitahukan adanya program WBK dengan cara media presentasi, menayangkan inovasi-inovasi yang ada dalam pelaksanaan WBK disertai dengan video dan foto-foto. Masyarakat dalam menerima informasi tersebut sudah menerima dengan baik secara bahasa dan bisa dipahami. Kedala ditemukan di lapangan adalah dalam tanggal pelaksanaan program yang tidak menentu, yang mengakibatkan kelompok sasaran tidak datang dalam pelaksanaan karena

lebih memilih mendahulukan pekerjaan pokok, sehingga ada kepentingan pribadi yang didahulukan. Ibu Yuni Karya selaku Tim Pengawasan juga menambahkan bahwa penerimaan informasi setiap orang juga berbeda-beda, sehingga mengakibatkan tingkat pemahaman program kelompok sasaran berbeda.

Konsistensi, komunikasi yang dilakukan dengan komunikasi langsung yaitu penyampaian informasi terkait pelaksanaan program sudah cukup jelas dan diterima oleh masyarakat. Konsistensi pihak Tim WBK BBPOM Yogyakarta konsisten dengan memberikan informasi setiap pelayanan berlangsung, saat apel pagi untuk pegawai dan setiap triwulan untuk *customer gathering* kepada sasaran program WBK pelaksana maupun sasaran program terkait dengan program WBK. Komunikasi yang dilakukan, dalam penyampaian informasi masih terdapat kendala yaitu ada beberapa sasaran program yang tidak datang karena kesibukan dari masing-masing pihak yang diundang.

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi suatu program agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Pada penelitian ini indikator sumber saya meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Staf di BBPOM Yogyakarta dalam menjalankan program WBK sudah ada dan mencukupi. Faktor penghambat dalam program WBK yaitu staf tidak paham akan pengembangan kompetensinya terhadap Pokja yang dimilikinya dalam mengaplikasikan *training need analysis* tiap Pokja, sehingga hal ini mengakibatkan tidak optimal. Berdasarkan data Laki BBPOM, bahwa belum tercukupinya pegawai sesuai Analisis Beban Kerja (ABK). Ibu Febriza selaku Pokja SDM menyampaikan kenyataan yang ada, banyak dari pegawai yang kurang menjalankan tugasnya di Pokja, staf lebih mementingkan urusan pekerjaan pribadinya sehingga hanya orang tertentu di Pokja yang menjalankan program. Terdapat staf yang masih bingung pelatihan seperti apa yang cocok untuk pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan WBK.

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan implementasi WBK sudah berjalan dengan baik terutama dalam *monitoring*. Evaluasi tidak selalu dilakukan setelah kegiatan selesai. Hal ini dikarenakan ketika selesai kegiatan pegawai kembali fokus pada pekerjaannya kembali sehingga beberapa staff saja yang aktif untuk membuat laporan.

Informasi yang diperoleh oleh pelaksana program WBK sudah cukup baik. Pihak dari sasaran program selalu diberitahukan melalui sosialisasi kegiatan program. Koordinator tiap Pokja secara konsisten menyampaikan program WBK dan mengingatkan tugas setiap Pokja.

Pelaksana program WBK selalu memberikan informasi kepada kelompok sasaran mengenai inovasi-inovasi dan perkembangan pelaksanaan program WBK di BBPOM Yogyakarta.

Wewenang yang diberikan oleh petugas layanan adalah menyampaikan informasi pelaksanaan implementasi program WBK kepada masyarakat. Koordinator Pokja memiliki wewenang untuk mengajak anggotanya dalam menjalankan tugas masing-masing Pokja dan memberikan laporan kepada Kepala BBPOM Yogyakarta. Pihak-pihak yang diberikan wewenang sudah menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan wewenang masing-masing pihak.

Fasilitas yang ada dalam pelaksanaan program semua sudah lengkap dan mencukupi. Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang untuk keberhasilan pelaksanaan program tanpa adanya sarana dan prasarana maka implementasi tidak akan berhasil. Fasilitas yang menunjang dalam program tersebut yaitu komputer/laptop, printer, area bermain, anak kotak saran, ruangan layanan, serta kelengkapan peralatan permainan anak. Fasilitas yang dirasa perlu perbaikan atau pergantian seperti komputer dan *standing LCD* mengalami kendala dalam modal/anggaran. Gambaran sarana prasarana dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Sarana Prasarana BBPOM Yogyakarta

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1	Laboratorium pengujian Obat dan Makanan	Laboratorium	2
2	Mobil laboratorium keliling	Unit	3
3	Mobil penyidikan	Unit	0
4	Mobil incenerator	Unit	1
5	Kendaraan operasional roda empat/enam	Unit	7
6	Kendaraan operasional roda dua	Unit	3
7	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)	Unit	0
8	Tempat penyimpanan barang bukti	Ruangan/ tempat khusus	0
9	Luas tanah	m2	6.477
10	Luas bangunan	m2	7.234
11	Alat pengolah data	Unit	386
12	Alat Studio dan Komunikasi	Unit	89
13	Peralatan perkantoran		
	• AC	Unit	126
	• Kursi	Unit	502
	• Meja	Unit	137
	• Lemari	Unit	170
	• Brankas	Unit	1
	• Genset	Unit	3
	• Hydrant	Unit	1

Sumber: Diolah peneliti

Dilihat dari fasilitas yang ada dalam pelaksanaan program WBK, semua sudah lengkap dan mencukupi. Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang untuk keberhasilan pelaksanaan program.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu program. Jika pelaksanaan suatu program diharapkan efektif,

maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa saja yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Pada indikator Disposisi pada penelitian ini meliputi pengangkatan birokrasi dan Insentif.

Pengangkatan Birokrasi, ditunjukkan dengan sikap petugas pelayanan dalam pelaksanaan program WBK terhadap sasaran sangat baik, cepat dan tanggap, pihak masyarakat memiliki rasa percaya terhadap petugas pelayanan. Walaupun tidak ada sistem *reward* dan *punishment* petugas pelayanan tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk pelayanan prima kepada masyarakat. Capaian layanan pengaduan BBPOM Yogyakarta dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian layanan pengaduan BBPOM Yogyakarta tahun 2021

Bulan	Layanan Pengaduan		
	Jumlah yang diselesaikan	Jumlah yang Masuk	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
Januari	1	1	100%
Februari	1	1	100%
Maret	1	1	100%
April	2	2	100%
Mei	1	1	100%
Juni	0	0	
Juli	1	1	100%
Agustus	0	0	
September	3	3	100%
Oktober	2	2	100%
Nopember	2	2	100%
Desember	2	2	100%
Total	16	16	

Sumber: Diolah peneliti

Pada capaian layanan informasi, BBPOM sudah melaksanakan dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 7. Capaian layanan Informasi BBPOM Yogyakarta tahun 2021

Bulan	Layanan Informasi		
	Jumlah yang diselesaikan	Jumlah yang Masuk	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
Januari	111	111	100%
Februari	75	75	100%
Maret	63	63	100%
April	57	57	100%
Mei	59	59	100%
Juni	138	138	100%
Juli	128	128	100%
Agustus	107	107	100%
September	132	132	100%
Oktober	113	113	100%
Nopember	167	167	100%
Desember	93	93	100%
Total	1243	1243	

Sumber: Diolah peneliti

Pelaksanaan program WBK dilakukan dengan layanan prima. Hal ini ditunjukkan dengan ketika petugas layanan mendapatkan saran atau kritik akan langsung diproses demi kelancaran pelaksanaan program WBK. Setelah hasil rekap laporan kritik dan saran dikumpulkan setiap bulan kemudian ditindaklanjuti. Faktor yang mendukung implementasi program WBK di BBPOM Yogyakarta adalah petugas yang menaati kode etik yang berlaku dan kepercayaan masyarakat terhadap petugas. Dari hasil wawancara menggambarkan sikap petugas pelayanan dalam pelaksanaan program WBK terhadap sasaran sangat baik, cepat dan tanggap, pihak masyarakat memiliki rasa percaya terhadap petugas pelayanan. Walaupun tidak ada sistem *reward* dan *punishment* petugas pelayanan tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil indeks kepercayaan masyarakat, seperti pada gambar berikut:

Gambar 3. Indeks Kepercayaan Masyarakat BBPOM Yogyakarta



Sumber: BBPOM di Yogyakarta, 2022

Insentif kepada pegawai dalam pelaksanaan Program WBK di BBPOM Yogyakarta tidak ada penambahan pendanaan secara khusus. Pegawai menyadari bahwa program WBK merupakan program dari pusat sehingga harus dilakukan dan dijalankan untuk masyarakat.

Struktur birokrasi pada pokok bahasan penelitian ini adalah terkait Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana program untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasil penelitian ditemukan prosedur yang dilakukan BBPOM Yogyakarta masih belum optimal. Hal ini terlihat pada tidak adanya SOP khusus yang digunakan pada implementasi program WBK. Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program WBK menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI dan Permen PAN & RB No. 10 Tahun 2019.

Kesimpulan

Hasil penelitian implementasi program WBK di BBPOM Yogyakarta dapat tergambar sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Beberapa kendala yang menyebabkan implementasi program WBK di BBPOM Yogyakarta memerlukan penyempurnaan. Kendala tersebut seperti pada komunikasi belum maksimal, Sumber daya pegawai lebih memilih pekerjaan pokok, *training need analysis* tiap Pokja belum optimal, kurangnya evaluasi mengakibatkan hanya beberapa pegawai yang aktif untuk membuat laporan. Belum tercukupinya pegawai sesuai Analisis Beban Kerja (ABK). Sarana dan prasarana yang perlu perbaikan tetapi mengalami kendala dalam anggaran perbaikan. Disposisi dalam pelaksanaan program WBK dilakukan dengan pelayanan prima, untuk *reward* dan *punishment* petugas pelayanan belum ada, namun petugas pelayanan tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk pelayanan prima kepada masyarakat. Pegawai BBPOM di Yogyakarta tidak menerima insentif terkait dalam pelaksanaan program dikarenakan program WBK merupakan program dari pusat sehingga harus dilakukan dan dijalankan untuk masyarakat. Prosedur yang dilakukan BBPOM Yogyakarta masih belum optimal. Hal tersebut berkaitan dengan SOP yang digunakan pada implementasi program WBK belum ada, namun dalam pelaksanaannya menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI dan Permen PAN & RB No. 10 Tahun 2019. Peneliti memberikan saran bahwa program WBK terus diupayakan untuk dijalankan dengan beberapa perbaikan sehingga capaian pelaksanaan program WBK lebih optimal.

Daftar Pustaka

Buku

- Farida, Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio
- Mudasir. 2012. *Desain Pembelajaran*. Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah.
- Muhaimin, Suti'ah. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Internet

- Sudjatmiko, Tommy. 2019. *BBPOM Yogya Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi 2019*. Yogyakarta:KR Jogja. URL:[https://www.krjogja.com/peristiwa /%20nasional/bbpom-yogya-raih-predikat-wilayah-bebas-korupsi-2019/](https://www.krjogja.com/peristiwa/%20nasional/bbpom-yogya-raih-predikat-wilayah-bebas-korupsi-2019/) diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 pukul 08.00 WIB.